

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Kolaka

Nur Atika Resky Atika, La Ode Turi, Arnadi Chairunnas*
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka
e-mail: arnadichairunnas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi penggajian di kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem penggajian di kantor-kantor tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara efektif, terutama karena adanya peran ganda di dalam departemen BKAD yang bertugas untuk menyusun daftar gaji dan memproses pembayaran gaji. Meskipun dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian secara umum sudah memadai, namun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti tidak adanya dokumen gaji, bukti pembayaran, dan bukti transfer. Prosedur-prosedur yang menyusun sistem penggajian tersebut meliputi pencatatan kehadiran pegawai dan dokumen-dokumen terkait, serta pemrosesan penggajian pegawai, yang semuanya dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang terpadu. Catatan-catatan akuntansi yang digunakan di kantor ini terdiri dari jurnal umum, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan inventaris, yang selanjutnya diserahkan kepada BKAD untuk dimasukkan ke dalam sistem penggajian.

Kata kunci: Analisis, Sistem Akuntansi, Penggajian

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the payroll accounting system at the Civil Service Police Unit and Fire Department of Kolaka Regency. The approach used in this study is descriptive qualitative, with types and sources of data that include primary and secondary data. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, as well as drawing conclusions and data verification. The results of the study indicate that the functions related to the payroll system at the Civil Service Police Unit and Fire Department have not been fully implemented properly, due to the dual duties in the BKAD section, which acts as a payroll compiler and also makes salary payments. Although the documents used in the payroll system in this office are quite good, there are still shortcomings, such as the absence of salary cover documents, pay slips, and proof of transfer. The procedures that form the payroll system include recording employee attendance and the documents used, as well as salary payment procedures to employees, which are carried out in a series of activities. The accounting records applied in this office include general journals, balance sheets, budget realization reports, operational reports, and equity reports, which are then reported to BKAD to be included in the payroll system

Keywords— Analysis, Accounting System, Payroll

1. PENDAHULUAN

Lembaga yang memproses penggajian secara teratur, maka biaya yang dikeluarkan relatif tinggi. Agar proses penggajian berjalan efektif dan lancar dari akun hingga pembayaran, maka diperlukan sistem penggajian yang solid. Ini akan memudahkan navigasi proses penggajian.

Apabila telah memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan atau para pengguna informasi, maka sistem informasi akuntansi yang ada saat ini akan efektif. Gaji dan upah merupakan beban yang cukup besar bagi suatu badan usaha dan instansi, dan juga merupakan salah satu peluang terjadinya manipulasi dan kerugian. Oleh karena itu, manajemen suatu badan usaha atau instansi perlu memperhatikan sistem akuntansi yang digunakan, dalam hal ini program pembukuan gaji. Untuk mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan dalam sistem akuntansi penggajian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka, maka sistem akuntansi penggajian harus dievaluasi guna meningkatkan pelaksanaan sistem pembayaran. Hal ini juga menyangkut efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi penggajian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 mengubah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Bagian SDM dan penggajian perlu merekrut staf yang kompeten dan andal, dan akuntansi penggajian serta pencatatan tugas atau pekerjaan harus tetap dipisahkan. Oleh karena itu, kantor harus memiliki sistem penggajian yang dapat dipercaya untuk menghindari penipuan atau kinerja pekerjaan yang tidak tepat. Komponen internal organisasi dari sistem akuntansi penggajian diharuskan untuk memberikan informasi akuntansi penggajian yang tepat dan tepat waktu.

Sistem akuntansi penggajian Ini adalah sistem yang menangani penggajian, transaksi karyawan, dan pemrosesan pembayaran. Proses yang membentuk jaringan sistem ini meliputi proses untuk penentuan pendapatan tunai, pembayaran upah, pencatatan kehadiran, penentuan gaji, dan distribusi biaya gaji. Pentingnya sistem pengendalian internal untuk penggajian dan perlindungan aset dalam organisasi untuk memastikan keandalan dan

kebenaran data akuntansi, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kepatuhan terhadap aturan organisasi.

Peraturan penggajian pemerintah menuntut kehati-hatian yang lebih besar dalam menghitung jumlah gaji untuk mencegah ancaman penipuan; hal ini terutama berlaku untuk bisnis atau organisasi pemerintah dengan tenaga kerja yang besar di mana pembayaran gaji perlu diawasi dengan ketat. Sistem akuntansi sangat penting bagi operasi bisnis karena sangat penting untuk menganalisis aktivitas lembaga.

Sistem akuntansi, menurut Asmana (2022), adalah perusahaan yang menghasilkan dokumen, catatan, dan laporan yang dimaksudkan untuk memberikan data keuangan kepada manajer sehingga mereka dapat membuat keputusan dengan lebih mudah. Banyak lembaga telah mulai beralih ke sistem akuntansi terkomputerisasi sebagai hasilnya. Pemrosesan data akuntansi otomatis dapat meningkatkan kemandirian dan efisiensi organisasi sambil menghasilkan data yang dapat dipercaya.

Penggajian merupakan salah satu cara lembaga menggunakan sistem akuntansi. Sistem akuntansi penggajian lembaga pada dasarnya harus terorganisasi dengan baik dan terintegrasi. Karena konsekuensinya jika tidak Kepercayaan pegawai terhadap kantor dapat terkikis oleh sistem informasi akuntansi penggajian yang buruk. Oleh karena itu, efektivitas kinerja pegawai di dalam lembaga dapat menurun sebagai akibat dari berkurangnya kepercayaan pegawai terhadap organisasi.

Kantor dengan sistem pembayaran gaji sendiri merupakan salah satu dari banyak fenomena yang jelas terlihat di sana. Metode akuntansi yang digunakan lembaga ini tidak tepat mengingat jumlah stafnya yang besar. Lebih jauh, laporan gaji yang belum dibayarkan menjadi masalah, dan bagian penggajian tidak efektif karena gaji tidak dibayarkan tepat waktu atau sama sekali karena pegawai lambat memberikan data tetap atau variabel mereka. Membayar pekerja yang biasanya menyiapkan laporan seharusnya dilakukan demikian.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi deskriptif maupun kualitatif digunakan dalam jenis penelitian ini. Untuk

memahami dan mengkarakterisasi secara menyeluruh fenomena penggunaan sistem akuntansi penggajian merupakan tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dua kategori informasi yang berbeda. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen. Pengumpulan informasi, pemrosesan, penyajian, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi semuanya dianggap sebagai kegiatan analisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Berkaitan Dengan Fungsi Yang Terkait

Teori Rahmawati dan Sumarno menyebutkan bahwa terdapat lima fungsi yang Menyusun. Kelima peran tersebut juga dimanfaatkan oleh Kantor Satpol PP dan Damkar.

a) Peran personal

Peran ini bertugas merencanakan dan mengawasi pemanfaatan tenaga kerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dinas PNS dan Dinas Umum menjalankan fungsi personalia dengan baik.

b) Kemampuan pencatatan waktu

Semua personel pada wilayah kantor Satpol PP dan Damkar wilayah Kolaka memiliki pencatatan waktu melalui fungsi pencatatan waktu. Tujuan pencatatan waktu dan ketidakhadiran adalah untuk menjamin setiap pekerja melaksanakan tugasnya dengan baik.

c) Operasional Penghasil Gaji

Gaji yang dihasilkan oleh fungsi ini mencakup total pendapatan karyawan serta semua potongan yang mereka buat selama periode penggajian. BKAD menyiapkan cek gaji, yang kemudian diberikan kepada Kasir Gaji.

d) Peran Akuntansi

Pengelolaan tugas yang timbul dari hubungan penggajian berada di bawah lingkup. BKAD bertanggung jawab untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di Kantor Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kolaka.

e) Bagian Keuangan

Pembayaran gaji pegawai melalui cek merupakan tanggung jawab bagian keuangan. Bagian keuangan mengawasi Kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kolaka.

Sistem akuntansi penggajian di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka mencakup lima komponen yang berkaitan dengan fungsi utama, sesuai dengan teori yang berlaku.

3.2 Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Berkaitan Dengan Dokumen Yang Terkait

Dokumen-dokumen berikut digunakan dalam sistem penggajian Satpol PP & Damkar Kabupaten Kolaka: surat pengangkatan, bukti pengeluaran kas, daftar gaji, ikhtisar gaji, dan dokumen pendukung untuk perubahan gaji.

Mengingat Satpol PP & Damkar Kabupaten Kolaka menggunakan mesin absensi dan bukan kartu absensi untuk mencatat kehadiran pegawai, maka metode pencatatan dokumen yang digunakan oleh organisasi tersebut sepenuhnya sesuai dengan teori.

Surat keputusan tentang penyesuaian gaji, termasuk rekrutmen baru, promosi, atau perubahan pada karyawan yang ada, berfungsi sebagai dokumentasi pendukung agensi untuk perubahan upah. Ekstrak penggajian, seperti amplop penggajian, sudah berisi catatan tentang rincian upah dan potongan setiap karyawan, sehingga agensi tidak perlu menggunakan surat penggajian. Amplop penggajian tidak digunakan oleh kantor karena gaji ditransfer ke rekening masing-masing. Bukti pencairan uang tunai digunakan sebagai bukti saat mencatat pembayaran tunai untuk pembayaran penggajian.

3.3 Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Berkaitan Dengan Jaringan Prosedur

Kebijakan tersebut berlaku di Satpol PP dan Damkar. Hanya satu prosedur yang belum digunakan, yaitu prosedur pembagian biaya gaji. Hal ini dikarenakan prosedur pembagian gaji yang membagi gaji dari berbagai satuan kerja yang menerima fungsi kerja belum diterapkan.

Akibatnya, dapat dikatakan bahwa Satpol PP dan Damkar hanya menggunakan empat komponen jaringan prosedural, sedangkan teori Asmana menyebutkan ada lima.

3.4 Analisis Sistem Akuntansi Penggajian Berkaitan Dengan Catatan Akuntansi

Jurnal umum digunakan oleh kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara

eksklusif. Catatan akuntansi berikut tidak digunakan oleh kantor Satpol PP dan Damkar:

a) Bagan Biaya Produk

Upah untuk karyawan dibayarkan agar didokumentasikan dalam memorandum. Karena tidak mengeluarkan arahan yang jelas, kantor Satpol PP dan Damkar tidak menyimpan catatan ini.

b) Kartu Biaya

Setiap departemen menggunakan yang terkait dengan produksi. Karena Kepolisian Layanan Sipil dan Dinas Pemadam Kebakaran adalah lembaga pendidikan dan bukan bisnis yang bergerak di bidang produksi, mereka tidak membuat catatan ini.

c) Kartu Pendapatan Gaji

Pendapatan setiap karyawan dan berbagai potongan untuk kantor Satpol PP dan Damkar didokumentasikan dalam memorandum ini.

4. KESIMPULAN

Kantor Satpol PP dan Damkar telah mengotomatiskan sistem akuntansi penggajian mereka. Sebagai akibat dari tanggung jawab ganda BKAD sebagai pembayar dan pembuat gaji, sistem penggajian tidak berfungsi dengan baik, menurut penelitian tersebut.

Sistem penggajian kantor Satpol PP dan Damkar tidak memiliki dokumentasi yang memadai. karena banyak dokumentasi yang hilang. Kantor Satpol PP dan Damkar memiliki cukup data akuntansi dari sistem penggajian untuk menjaga efisiensi dan efektivitas.

Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian tidak terlalu efektif karena departemen penggajian tidak memantau dengan baik ketidakhadiran pegawai yang dapat menyebabkan risiko kegagalan disertai kesalahan atau tindak kecurangan lain.

5. SARAN

Mencegah bagian BKAD menangani tugas-tugas yang berulang-ulang lebih baik. Jika ada petugas yang mengawasi, akan lebih baik jika ada yang bertugas memasukkan kartu kehadiran ke dalam alat pencatat waktu. Ini adalah dasar untuk gaji pegawai karena kartu kehadiran dan ketidakhadiran menunjukkan waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai. Penggajian harus diserahkan ke Departemen Kepegawaian Negara agar dapat ditinjau secara

bertahap. Setelah nama-nama dalam buku penggajian diverifikasi, BKAD memeriksanya sekali lagi sebelum memulai peninjauan. Tidak hanya satu kantor yang terpengaruh oleh ini. Semakin banyak, daripada terbatas pada satu area.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adillah, S. N., & Lubis, A. W. (2023). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iii Kebun Bandar Selamat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(3), 1–14. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20402>
- [2] Asmana, Y. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Mandiri Persero Tbk, di Jakarta Selatan. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 81–92. <https://jurnal.stieganessa.ac.id/index.php/ekmabis/article/view/54>
- [3] Fadli, M., Rajindra, & Guasmin. (2022). Analisis Sistem Akuntansi Penggajian pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Payroll Accounting System Analysis at the Regional Revenue Service of Central Sulawesi Province. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(1), 1–6.
- [4] Friska, F. N. P., & Kamilah, K. k. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Karyawan Dalam Upaya Mendukung Efektifitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus PT Fajar Agung Desa Bengabing). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i1.648>.
- [5] Haripratiwi, Ika. 2006. Analisis Sistem Pengendalian Intern Penggajian Karyawan Pada BMT. Al Ikhlas Yogyakarta. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Surakarta. <http://www.idb4.wikispaces.com>. Diakses Maret 2015. Hal. 39-66.
- [6] Hanifah, R. U., Rizkiana, C., & Riyanto, S. (2023). Pemberdayaan Umkm Dalam Penerapan Akuntansi Umkm Berbasis Aplikasi Sederhana. *Tematik*, 3(2), 107. <https://doi.org/10.26623/tmt.v3i2.7365>
- [7] Kakasih, G. G., Pangemanan, S. S., & Pinatik, S. (2019). Penerapan Sistem

- Akuntansi Penggajian (Studi Kasus Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi) Application of Payroll Accounting System (Case Studies At Faculty Economic and Business Sam Ratulangi University). *Penerapan... 3059 Jurnal EMBA*, 7(3), 3059–3068.
- [8] Mauliza, Febria, 2009. Peranan Sistem Akuntansi Dalam Mendukung Pengendalian Intern Atas Gaji dan Upah Pada PT. Mopoli Raya. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan. <http://repository.usu.ac.id>. Diakses Maret 2015. Hal. 19-41.
- [9] Nurhasanah. 2016. Kutipan Skripsi Analisis Penerapan Anggaran Berbasis kinerja (Performance Based Budgeting) Pada Kantor Kecamatan Pontianak Barat.
- [10] Nuryana, I. K. D., Nurdin, S. R., Prisma, I. G. P. E., & Prehanto, D. R. (2020). Geographic Information System Mapping of Universitas Negeri Surabaya Facilities (Case Study: Universitas Negeri Surabaya Ketintang). *Journal of Physics: Conference Series*, 1569(2). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1569/2/022016>.
- [11] Purwanza, S. W., Wardhana, A., Mufidah, A., Renggo, Y. R., Hudang, A. K., Setiawan, J., & Darwin. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. In *Media Sains Indonesia* (Issue March).
- [12] Rahmawati, I. D., & Sumarno. (2020). *Sistem Informasi Akuntansi & Manajemen* (Vol. 1).
- [13] Sugyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- [14] Sumarwanti, A., & Wicaksono, A. (2024). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penggajian pada PT Bintang Makmur. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6, 1–5. <https://doi.org/10.37034/infv6i1.781>
- [15] Wulandari, S. A., & Krisna Dewi, L. G. (2021). Minat, Perilaku Belajar Mahasiswa dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Pengantar Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 92. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p07>
- [16] Yanti, H., & Mustoffa, A. F. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Rangka Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Daria Dharma Pratama Air Berau). *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 5(1). <https://doi.org/10.24269/asset.v5i1.4955>

